

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
PADA KELURAHAN SAKO KOTA PALEMBANG**

Oleh : Saiton, S. Sos., M. Si.

Handphone : 0813-73-740072

Email : saiton289@gmail.com

(Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang)

ABSTRAK

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di tanah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan kesimpulannya bahwa hasil dari penelitian yang diamati dan di alami bahwasanya program pemerintah sudah benar-benar berjalan secara pelaksanaan sudah baik karena masyarakat ikut turut serta bergotong-royong membantu demi memajukan kelurahan dan program pemerintah sudah tepat karena sesuai apa yang masyarakat butuhkan demi meningkatnya ekonomi kelurahan meski belum maksimal karena keterlambatan bantuan dana turun dari pusat jatuh pada semester ke dua dari hasil ini peneliti dapatkan bahwa tingkat program evaluasi LPMK adalah lemahnya dana yang dimiliki sehingga proses LPMK terhambat tidak sesuai jadwal

Kata Kunci : Evaluasi, Perda, dan Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Evaluasi adalah: “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut” menurut Wirawan (2012:7).

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan pemerintahan (Sunyoto 2004:154).

Menurut Sutopo (2002:45-46) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mengayomi kehidupan Masyarakat dalam Pemberdayaan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat biasa berjalan lebih

optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. Saran dalam fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan guna mengatasi kendala intern kerja sama dengan pihak akademisi atau pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitannya dengan dana operasional dari Pemerintah Kota dan penambahan dana operasional lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsi agar di dalam penerapan antara anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerja sama yang baik.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di

bidang pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, dan melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari Lembaga tersebut. Dalam melaksanakan Tugas tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan seperti yang termuat dalam pasal 6 ayat 1 perda Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong-royong, pertemuan warga secara berkala dan secara insidental.
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan antara lain melalui pendataan potensi kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pengendalian pemecahan masalah pembangunan.
3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan antara lain melalui rapat antar lembaga sosial kemasyarakatan di kelurahan.
4. Perencanaan kegiatan pembangunan antara lain melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.
5. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan antara lain melalui pelaksanaan pelestarian, peningkatan sumber daya manusia (SDM), nilai-nilai sosial budaya, penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 3 September 2019, maka peneliti menemukan indikasi-indikasi permasalahan yaitu:

Berdasarkan dari hasil peneliti tentang Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bahwa program peraturan tersebut kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat awam belum mengetahui apa saja isi dari program-program dan tugas LPMK sehingga masyarakat kurang diperhatikan dan dipedulikan atas wewenang tugas yang diberikan kepada LPMK. Namun hadirnya lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat bisa menjadi solusi untuk membantu setiap masalah pembangunan di masyarakat, agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selalu mengkoordinasikan setiap masyarakat agar peduli dengan lingkungan.

Dengan adanya kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) yang mengayomi masyarakat Kelurahan Sako dalam hal Pembangunan, Gotong-

royong, Partisipasi, memaksa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh di Kelurahan, maka diperlukan adanya pengawasan dari Pimpinan, Dorongan dan Motivasi Pegawai yang kuat dan tinggi terhadap masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menentukan judul penelitian : “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sako Kota Palembang”.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sako Palembang ?

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah:

“Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut buku Metode Riset Evaluasi, Hadi (2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”.

Selanjutnya dalam buku yang sama, Hadi (2011: 13-14) memaparkan riset evaluasi sebagai:

“Aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial Menurut definisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam di antaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia lainnya”.

Pendapat selanjutnya muncul dari Husni (2010: 971), yang menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan”. Sedangkan menurut Arikunto (2010:1). “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sejalan dengan definisi evaluasi menurut Wirawan dan Hadi, secara Sederhana menurut peneliti evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan penilaian yang ditujukan

kepada objek evaluasi, untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi.

Jenis-Jenis Evaluasi

Wirawan (2012:16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

- a) Evaluasi Kebijakan “Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya”.
- b) Evaluasi Program: Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program ; “Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluatio*)”. Sapta pesona yang merupakan sebuah bentuk program bidang kepariwisataan, sesuai dengan jenis evaluasi yang ada maka masuk dalam jenis evaluasi program dan akan dievaluasi dengan tahapan evaluasi program yang sesuai.
- c) Evaluasi Proyek: Evaluasi proyek sebagai “kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program”.
- d) Evaluasi Material: Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, “untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut”.
- e) Evaluasi Sumber: Daya Manusia (SDM) Evaluasi sumber daya manusia atau yang yang dikenal dengan evaluasi kinerja di lakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human *resources development*. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat”.

Model-Model Evaluasi

Dalam mengevaluasi suatu program ada banyak model yang dikemukakan oleh para ahli. Meskipun

antara satu dan yang lainnya berbeda, namun maksud dan tujuannya sama. Model evaluasi menurut Tayib Nafis (2008: 13-22) adalah model desain evaluasi oleh para pakar dan ahli. Sebagai berikut :

1. Goal Oriented Evaluation / Model Tyler

Dalam model ini, yang menjadi objek pengamatan adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program di mulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaannya. Model ini menggunakan tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dari program. Evaluator mencoba mengukur sampai di mana tujuan dari program telah di capai.

2. Goal Free Evaluation Model (Michael Scriven)

Menurut Scriven, dalam pelaksanaan evaluasi program, Evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, akan tetapi bagaimana bekerjanya suatu program, dengan cara mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif maupun yang negatif. Alasannya karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika tujuan-tujuan khusus tercapai artinya terpenuhi dalam penampilan.

Dalam model ini, evaluator sengaja menghindari untuk mengetahui tujuan program, berfokus pada hasil yang sebenarnya bukan hasil yang di rencanakan, hubungan evaluator dan peserta dibuat seminimal mungkin, dan tujuan yang telah di rumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan untuk menyempitkan fokus evaluasi.

3. CIPP Model (Context, Input, Process, Product)

Konsep evaluasi model CIPP pertama kali di tawarkan oleh stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil dari usahanya dalam mengevaluasi ESEA (*The Elementary and Secondary education Act*).

Stufflebeam menawarkan konsep tersebut dengan pandangan bahwa tujuan penting dari sebuah evaluasi adalah bukan untuk membuktikan sesuatu, akan tetapi adalah untuk memperbaikinya. Evaluasi model CIPP dapat di terapkan dalam bidang pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya, serta dalam berbagai jenjang, baik proyek, program maupun institusi.

4. Model Empat Level Donald L. Kirkpatrick

Merupakan model evaluasi pelatihan yang di kembangkan pertama kali oleh Kirkpatrick (1959) dengan menggunakan empat level dalam mengategorikan hasil-hasil pelatihan.

Empat level tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Evaluasi Reaksi (*Evaluating Reaction*)
Reaksi dilakukan untuk mengukur tingkat reaksi yang di desain agar mengetahui opini para peserta pelatihan mengenai program pelatihan.
- b) Evaluasi Pembelajaran (*Evaluating Learning*)
Ada tiga hal yang dapat Instruktur ajarkan dalam program *training*, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan.

c) Evaluasi Tingkah Laku (*Evaluating Behavior*)
Penilaian tingkah laku di fokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja.

d) Evaluasi Hasil / Dampak Program Pelatihan (*Evaluating Result*)
Evaluasi hasil di fokuskan pada hasil akhir (*final Result*) yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program.

5. Model UCLA

Evaluasi model ini dikembangkan oleh Alkin pada tahun 1969. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi.

Lima macam evaluasi yang dikemukakan Alvin :

- a) *System Assessment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
- b) *Program Planning*, membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
- c) *Program Implementation*, yang menyiapkan informasi apakah program sudah di perkenalkan kepada kelompok tertentu.
- d) *Program Improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi dan bagaimana program berjalan.
- e) *Program Certification*, yang memberikan informasi tentang informasi atau guna program.

6. Model Formatif vs Sumatif

Model ini dikembangkan oleh Scriven pada tahun 1967. Menurut Scriven evaluasi terhadap program dapat di bedakan menjadi dua :

- a) Evaluasi Formatif adalah proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program instruksional.
- b) Evaluasi Sumatif adalah Evaluasi yang dilaksanakan saat program telah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau para pengambilan keputusan.

7. Model Kesesuaian

Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat (*congruence*) antara tujuan dengan hasil belajar yang telah di capai.

8. Model Pengukuran

Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat (*attribute*) tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu.

9. Model Yang berorientasi pada tujuan

Model evaluasi ini menggunakan tujuan pembelajaran umum (TPU) dan tujuan pembelajaran khusus (TPK) sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Tujuan model ini membantu guru merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antar tujuan dengan kegiatan.

Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

- a) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- b) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
- c) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
- d) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
- e) Pengembangan staf program.
- f) Memenuhi ketentuan undang-undang.
- g) Akreditasi program.
- h) Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*.
- i) Mengambil keputusan mengenai program.
- j) Akuntabilitas.
- k) Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.
- l) Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Fungsi Evaluasi

Menurut Crawford (2000 ; 30), fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Evaluasi Program

Evaluasi program adalah langkah awal pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian tindak lanjut yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para pengambil keputusan. Sedangkan evaluator adalah orang yang melakukan evaluasi. Banyak ragam atau jenis evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program. Hamalik (2003:212) mengemukakan bahwa model atau jenis evaluasi program tersebut adalah:

- a) Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan implementasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program di kemudian hari.
- b) Evaluasi monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain secara spesifik dalam program itu

terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran, karena apa yang telah didesain dalam program tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan seperti pengadaan personil, fasilitas, perlengkapan, biaya, dan faktor-faktor penyebab lainnya.

- c) Evaluasi dampak, bertujuan menilai seberapa jauh program dapat memberikan pengaruh tertentu pada sasaran yang telah ditetapkan, apakah program berdampak positif atau justru sebaliknya. Dampak tersebut diukur berdasarkan kriteria-kriteria keberhasilan, sehingga program tersebut perlu di spesifikasi agar dapat diamati dan diukur setelah program itu dilaksanakan.
- d) Evaluasi efisiensi, dimaksud untuk menilai berapa besar tingkat efisiensi suatu program. Apakah program mampu memberikan keuntungan memadai ditinjau dari segi biaya yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan dan waktu yang terpakai.
- e) Evaluasi program komprehensif, yaitu dampak menyeluruh terhadap program yang meliputi; implementasi program, dampak atau pengaruh setelah program dilaksanakan dan tingkat efisiensi program.

Terdapat beberapa model evaluasi lainnya yang populer di antaranya menurut Tayibnapis (2008: 13-22) Membedakan model evaluasi program ;

1. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh stufflebeam, adalah ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan. ia merumuskan evaluasi sebagai “suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan”
2. Evaluasi model UCLA, dikembangkan oleh Alkin. Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dan memilih beberapa alternatif.
3. Model Brinkerhoff, mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, di antaranya
 - a) *Fixed vs emergent evaluator design.*
 - b) *Formatif vs sumatif evaluation,*
 - c) *Experimental and quasi experimental design vs natural/unobtrusive inquiry.*
 - d) Model Stake atau Countenance, penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi.

Stake mengatakan bahwa *description* di suatu pihak berbeda dengan *judgment* atau menilai. Selanjutnya Wirawan (2012:17) mengelompokkan

evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
2. Evaluasi manfaat (*Outcome Evaluation*) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
3. Evaluasi akibat (*Impact Evaluation*) di mana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

Evaluasi proses dijalankan dengan melakukan penilaian terhadap sebuah informasi yang diperoleh, dengan melihat apakah layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, informasi tersebut kemudian dianalisis dan dapat disajikan dengan data yang bersifat kualitatif. Dalam modul pengantar evaluasi program Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi proses dilakukan dalam 2 tahapan penilaian yaitu;

- a) Tahap pertama, pengukuran atau penilaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap standar yang ditetapkan
- b) Tahap kedua, perbandingan yang telah diperoleh kemudian disimpulkan dan dikualitatifkan sesuai dengan tujuan penilaian yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut.

Model Evaluasi *Context, Input, Proses, Product* (CIPP)

Stufflebeam dalam Wirawan (2012:136) menyatakan “Model CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek, program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem”. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek atau penyediaan layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal. Model evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan misalnya pendidikan, perumahan, pengembangan masyarakat, transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer (stufflebeam, 2003). Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), dan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*).

Tabel Model Pendekatan Evaluasi Kebijakan Berbasis CIPP

<i>EVALUASI</i>	
<p>1. Context Evaluation</p> <p>1. Berupaya untuk mencari jawaban atas pernyataan: Apa yang perlu dilakukan?</p> <p>2. Waktu pelaksanaan: Sebelum program diterima</p> <p>3. Keputusan program</p>	<p>2. Input Evaluation</p> <p>1. Berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang harus dilakukan ?</p> <p>2. Waktu pelaksanaan: Sebelum program dimulai</p> <p>3. Keputusan: penstrukturan program</p>
<p>3. Process Evaluation</p> <p>1. Berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: apakah program sedang dilaksanakan ?</p> <p>2. Waktu pelaksanaan: ketika program sedang dilaksanakan</p> <p>3. Keputusan: Pelaksanaan program</p>	<p>4. Product Evaluation</p> <p>1. Berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: Apakah program sukses ?</p> <p>2. Waktu pelaksanaan: ketika program selesai.</p> <p>3. Keputusan: Resikel; ya atau tidak program harus diretikel.</p>

Sumber: *Model Evaluasi CIPP Stufflebeam dalam Wirawan (2012 : 137).*

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. (Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002).

Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong-royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Konsep gotong-royong menurut Koenjaraningrat (1985:61) adalah:

“Sejarah konsepnya gotong-royong tolong menolong, yang mula-mula hanya berwujud sebagai suatu sistem pengerahan tenaga tambahan pada masa-masa sibuk dalam produksi bercocok tanam, sebagai sistem tolong menolong antara tetangga dan kerabat dalam kesibukan-kesibukan sekitar rumah tangga, waktu berpesta dan pada peristiwa-peristiwa kematian dan bencana, dijadikan satu dengan sistem rodi itu? Rupa-rupanya, sejarahnya mulai pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam zaman Jepang, mengangkat konsep itu menjadi suatu unsur yang amat penting dalam rangkaian prinsip-prinsip dasar dari Negara”.

Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam gotong-royong tersebut sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, maka dirasakan perlu untuk melestarikan dan

mengembangkan nilai-nilai gotong-royong tersebut dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Daerah Palembang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Palembang Nomor 22 Tahun 2002 dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong-royong pertemuan warga secara berkala dan insidental
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan antara lain melalui pendataan potensi kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inventarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan.
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan antara lain melalui rapat antarlembaga sosial kemasyarakatan di kelurahan.
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan antara lain melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat.
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan antara lain melalui pelaksanaan pelestarian, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), nilai-nilai sosial budaya, penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Menurut Mathis dan Jackson 2006:3 Sumber daya manusia adalah desain sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tujuan kedua yang dikutip Saporin dalam buku Rahyunir dan Yusri Munaf, (2006:19) bahwa meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga secara tidak langsung lembaga masyarakat membantu menjalankan fungsi pemerintah. Seperti yang dinyatakan Saporin;

“walaupun organisasi RT/RW bukan lembaga pemerintahan, namun dalam batas-batas tertentu kewajiban memberi bantuan kepada aparatur pemerintahan”.

Tinjauan Pembangunan

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi (1981:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa:

“Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”

Selaras dengan pengertian di atas, maka secara ringkas dapat dikemukakan bahwa (Mardikanto, 2009:6):

Pengertian tentang “pembangunan” sebagaimana telah dikemukakan dalam rumusan (Mardikanto, 2009:6) di atas, memberikan arahan bahwa:

- Pembangunan, merupakan proses yang dilakukan oleh banyak pihak, dalam upayanya untuk terus menerus memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu-individu yang menjadi anggotanya.
- Dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki itu, kegiatan pembangunan senantiasa memanfaatkan teknologi yang terpilih yang diyakini paling “baik” dalam arti berhasil guna dan berdaya guna.
- Di dalam pengertian tujuan pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dan individu yang menjadi anggotanya tersebut terkandung pemahaman tentang: upaya pemenuhan kebutuhan dan atau pemecahan masalah yang akan dihadapi atau yang telah dirasakan oleh pelaku-pelaku pembangunan tersebut.

Bornby (1974:196) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Menurut Nawawi dan Martini dalam Prastowo, (2011:22) “Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara. Penggunaan metode dimaksudkan agar

kebenaran yang diungkapkan benar-benar berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, metode dapat diartikan pula sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berpikir tentang materinya”

Menurut Strauss yang dikutip oleh Rulam Ahmadi (2016:15) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Evaluasi Perda Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sako Palembang.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah pengertian Evaluasi dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

- Evaluasi adalah: “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut” menurut Wirawan (2012:7).
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. (Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Palembang Nomor. 22 Tahun 2002).

Adapun *Variabel* dan Definisi Operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Definisi Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sako Kota Palembang Model Ealuasi Daniel Stufflebeam dalam Wirawan (2012: 95)	Konteks	1. Kebijakan Ketua LPMK 2. Kebutuhan yang akan dicapai atau di penuhi
	Input	1. Ketersediaan Tenaga Kerja 2. Alokasi Anggaran dan Pengguna
	Proses	1. Kesesuaian rincian pelaksanaan program 2. Aktivitas pelaksanaan program
	Produk	Tingkat keberhasilan perda Nomor 22 Tahun 2002 tentang LPMK

Sumber informasi adalah informan yang berkomponen dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing mereka adalah Lurah, Perangkat Lurah dan Masyarakat.

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Lurah Kelurahan Sako	1 Orang
2	Sekretaris Kelurahan Sako	1 Orang
3	Kasi Pembangunan	1 Orang
4	Kasi trantribwil	1 Orang
5	Masyarakat	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Teknik Studi Pustaka, dan Teknik Dokumentasi

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Di mana menurut Denzin dan Lincoln dalam Creswell yang dikutip oleh Rulam Ahmadi (2016:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multi metode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok permasalahannya Adapun dengan pendapat tersebut di atas, maka analisis yang digunakan adalah kualitatif, di mana data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Sako Palembang yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di deskripsikan secara kualitas yaitu :

1. Data *Reduction* (reduksi data)
Tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat dari hasil penelitian kemudian direkam dalam bentuk catatan lapangan. Selanjutnya, melakukan penyeleksian masing-masing data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Data *Display* (penyajian data)
Setiap data yang diperoleh, disajikan dalam bentuk daftar kategori kemudian melakukan penafsiran dan interpretasi sehingga dapat memperjelas atau menjawab masalah yang diteliti. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang luas dari penemuan penelitian.
3. *Conclulsion drawing/verification* (kesimpulan atau verifikasi)
Melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapati, kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta proposisi. Kemudian menarik pokok pikiran atau memberi solusi atau tindakan yang perlu dilakukan setelah memperoleh hasil penelitian sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat, tringulasi (pemeriksaan keadaan data) sehingga kebenaran dapat dicapai.

HASIL PENELITIAN

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diolah untuk mengetahui evaluasi pemberdayaan dan pembangunan di Kelurahan Sako.

Evaluasi Konteks

Untuk mendukung upaya pemantapan terwujudnya kesatuan bangsa, serta untuk menyejahterakan masyarakat dalam rangka pembangunan mengkoordinasikan perlengkapan penyusunan program dan penyelenggaraan peraturan pemerintah. Hal ini merupakan kunci utama dari suatu LPMK. Agar tujuan dan sasaran mencapai hasil yang maksimal dengan tugas yang diberikan oleh pusat terhadap Lurah agar dilaksanakan dan tetap memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan aturan yang berlaku. Sehingga proses LPMK tersebut berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Berdasarkan hasil keterangan bahwasanya Peraturan Daerah LPMK dalam kebijakan program tersebut yang dilimpahkan kepada perangkat lurah sudah dikerjakan dan dilaksanakan sesuai perintah dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan akan tetapi ada sebagian masyarakat desa belum memahami isi dari program tersebut karena keterbatasan pengetahuan dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Evaluasi Masukan

Untuk mendukung suksesnya program pemerintah dalam melaksanakan LPMK dibutuhkan biaya anggaran dana yang cukup dan pelaksanaan yang matang maka dari itu input masukan dan belum sepenuhnya mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Sako.

Berdasarkan hasil keterangan dapat peneliti ketahui bahwa jumlah anggaran dana Kelurahan Sako yang dimiliki sampai sekarang ini belum mencukupi untuk kebutuhan dan keperluan sako, dan dana sako sifatnya tertutup di Kantor Lurah Sako Kecamatan Sako Kota Palembang.

Evaluasi Proses

Dalam hal ini merupakan suatu program pemerintah berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat biasanya meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan agar proses pelaksanaan berjalan dengan baik pemerintah menghitung biaya anggaran yang dimiliki agar dapat meminimalisir angka kegagalan dari proses pelaksanaan yang sudah di programkan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan bahwa hasil dari peneliti buat dapat dijelaskan yaitu proses program kebijakan pemerintah buat dan dilimpahkan ke perangkat desa sudah dikerjakan sesuai prosedur dan masyarakat sebagai pelaksana memang benar-benar membutuhkan program tersebut sehingga bermanfaat bagi masyarakat hanya saja sedikit kendala yang

dialami dalam proses pelaksanaan tersebut kurangnya anggaran dana dan keterlambatan bantuan dana dari pusat sehingga proses pelaksanaan tidak sesuai jadwal.

Evaluasi Produk

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa seorang lurah telah melaksanakan dan menjalankan perintah dari pusat sesuai dengan apa yang diamanatkan. Lurah selaku pemimpin lurah mempunyai wewenang serta tanggung jawab mengevaluasi urusan kegiatan di bidang pendapatan lurah sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan kepada Lurah ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta membantu mengevaluasi LPMK dan program kerja, sehingga dapat terwujud dan tercapainya LPMK.

Berdasarkan keterangan bahwa program pemerintah mengadakan LPMK sudah berjalan dengan baik hanya saja belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran biaya yang dimiliki.

Selain mewawancarai Lurah peneliti juga mewawancarai Bapak Junaidi selaku Sekretaris Kelurahan Sako hal senada yang diungkapkan oleh sekretaris Kelurahan Sako untuk mendapatkan data di dalam penelitian yang di mana sekretaris bertugas membantu pekerjaan seorang Lurah yaitu bertugas menyangkut urusan program LPMK serta mengkoordinasikan suatu penyelenggaraan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara tersebut peneliti, dapat menyimpulkan bahwa pembangunan sangat penting guna mencapai suatu keberhasilan dengan tujuan bersama.

Untuk mendapatkan data yang lebih riil dan mendalam, maka peneliti juga mewawancarai para tokoh masyarakat kelurahan sako mengenai LPMK.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti jelaskan mengenai program-program bahasanya tindakan diadakannya LPMK sangat bermanfaat bagi masyarakat Sako yang tujuannya mengubah taraf hidup, memperkecil angka pengangguran, bisa hidup sejahtera, serta hidup makmur dari hasil usaha kecil. Dari segi pemberdayaan sendiri mengubah pola pikir, mandiri, pengrajin hasil karya yang telah dilakukan oleh perangkat-perangkat desa sangat membantu guna menyongsong peningkatan swasembada ekonomi untuk melakukan program-program tersebut tidaklah mudah harus perlu adanya campur tangan pemerintah serta swadaya masyarakat sebagai pelaksana, jadi keterangan di atas bahwa LPMK sudah berjalan dan belum maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil setelah melakukan penelitian mengenai evaluasi peraturan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa program pemerintah sudah benar-benar berjalan, secara pelaksanaan sudah baik karena masyarakat ikut turut serta bergotong-royong membantu demi memajukan kelurahan dan program

pemerintah sudah tepat karena sesuai apa yang masyarakat butuhkan demi meningkatnya ekonomi kelurahan meski belum maksimal karena keterlambatan bantuan dana turun dari pusat jatuh pada semester kedua. Dari hasil ini, peneliti dapatkan bahwa tingkat program evaluasi LPMK adalah minimnya dana yang dimiliki sehingga proses LPMK terhambat tidak sesuai jadwal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2006. *Pembangunan Proyek-Proyek Daerah Tertinggal Transmigrasi Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- [Http://Sekedar cacatan ringan. blogspot.com/2014/12. Pembangunan Daerah Tertinggal](http://Sekedar.cacatan.ringan.blogspot.com/2014/12/Pembangunan-Daerah-Tertinggal.html). html. Di upload melalui Internet pada Tanggal 6 Februari 2018 Jam 10:13:56 GMT.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebianto . 2013 *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nazir, Muhammad. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- Sugiyono. 2014 *Tentang Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwandi, I, Nyoman. 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : CV. Citra Utama.
- Swastika Sonia. [blogspot.co.id/2015/07/ Teori-Pemberdayaan-Masyarakat.html](http://blogspot.co.id/2015/07/Teori-Pemberdayaan-Masyarakat.html) diakses pada tanggal 7 Februari 2018. 9:36.
- Syarif Makmur. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Manusia (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Evaluasi : Teori, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta : Rajawali pers.